



Kotak Pos 100

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN**

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax. (0751) 7740766
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor : 522.6/012/KPHL BB-2019



SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
KEGIATAN	: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA KPHL BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH TITIK PANAS (HOT SPOT) DARI ANGKA RERATA PERIODE TAHUN SEBELUMNYA (2011-2015)
KELUARAN	: JUMLAH PATROLI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
HASIL (OUTCOME)	: PERSENTASE PENURUNAN LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH KELOLA KPHL BUKIT BARISAN
VOLUME	: 20 (DUA PULUH)
SATUAN UKUR	: PERSEN
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01173.010.5.2
NILAI	: Rp. 89.245.000,- (DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

T.A 2019

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH KELOLA KPHL BUKIT
BARISAN
TAHUN 2019

A. Latar Belakang.

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, UPTD KPHL Bukit Barisan merupakan UPT di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang. Untuk melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, UPTD KPHL Bukit Barisan melaksanakan salah satu tupoksi pengendalian kebakaran hutan melalui kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perlindungan Hutan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Men-LHK/Set-Jen/Kum.1/3/2016 tentang Pegendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- h. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 260/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan;
- i. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;

- j. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas \pm 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1078 Tahun 2017;
- m. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- n. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Nomor 2.00.04.2.00.04.01173.010.5.2

2. Gambaran Umum.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan dan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Faktor manusia yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan diantaranya konversi lahan, kegiatan penyiapan lahan, dan pembukaan lahan untuk pertanian maupun perkebunan dengan cara pembakaran. Tingginya konversi lahan di Indonesia disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi masyarakat, kebijakan kepemilikan lahan, bencana alam, dan demografi serta konversi lahan.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah yang tepat dan berguna bagi penyelamatan hutan dari bahaya kebakaran. Untuk menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

Upaya pencegahan penanggulangan kebakaran dan lahan hutan Kementerian Kehutanan telah bekerja sama dengan Satelit NOAA untuk memantau titik api/hot spot baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

Patroli Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Namun demikian patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan hanyalah sebagai usaha menekan atau usaha mengetahui lebih dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, namun demikian usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan harus didasarkan pada teknik-teknik yang benar, agar diperoleh hasil yang optimal.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalaui DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan ini diharapkan kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan ditindak secara hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan baik langsung, maupun tidak langsung, khususnya pada wilayah UPTD KPHL Bukit Barisan.

Untuk membentuk kesamaan persepsi dan panduan teknis serta untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dilapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan dimaksudkan untuk penurunan luas kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan, memadamkan dan meminimalisir terjadinya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

B. TARGET/SASARAN PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan adalah :

1. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan (Hutan Lindung, dan Hutan Produksi).
2. Kelompok Masyarakat maupun Lembaga terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan .
3. Instansi terkait dengan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan, yaitu:
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Agam Kuantan;
 - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan;
 - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - Sub Bagian Program Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SKPD lain yang terkait, seperti Polri, TNI, dsb);
 - Pemerintah Kabupaten/Kota pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (SKPD yang terkait seperti Polri, TNI, dsb);

C. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Satker/SKPD : UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c. KPA : Bambang Suyono, S.Hut, MM

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan dilakukan melalui pelaksanaan pemadaman langsung lokasi hutan dan lahan yang terbakar, dan Patroli Pencegahan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan Tahun 2019 yaitu:

a. Penyiapan Bahan dan Administrasi

- 1) Surat Keputusan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja dan Petunjuk Pelaksana. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan yang dilampirkan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- 2) Penyelesaian administrasi belanja bahan habis pakai, Belanja Jasa Kantor, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman dan Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan rincian item pelaksanaan kegiatan;
- 3) Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada pelaksana sub kegiatan pemadaman langsung lokasi hutan dan lahan yang terbakar, dan Patroli Pencegahan;

b. Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,

merupakan kegiatan patroli yang dilakukan di sekitar dan dalam kawasan dengan maksud untuk memantau aktifitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menindak lanjut tegas para pelaku yang diketahui melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Adapun Tahapan pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan adalah sebagai berikut:

➤ **Pemahaman Terhadap Kegiatan**

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

➤ **Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan**

➤ **Koordinasi dengan pemerintah setempat,**

Koordinasi dilaksanakan guna mendapatkan informasi terkait dengan kebakaran Hutan dan Lahan maupun gangguan keamanan hutan di dalam wilayah UPTD KPHL Bukit Barisan. Tujuan dilaksanakan Koordinasi dengan pemerintahan setempat adalah untuk mengumpulkan data primer dan sekunder terkait kebakaran hutan dan lahan. Pengumpulan data tersebut dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah nagari dan tokoh masyarakat dan melaksanakan patroli pada sekitar kawasan hutan dan lahan. Langkah dalam pengumpulan data adalah:

✓ **Interview (wawancara)**

Interview atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Interview dilakukan antara lain dengan pejabat/aparatur nagari serta masyarakat setempat yang berkompeten.

✓ **Diskusi**

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan.

Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

- ✓ Pengumpulan Data Sekunder yang meliputi literatur, tulisan atau laporan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta mengambil/membuat dokumen pelaksanaan kegiatan berupa foto.
- ✓ Patroli
Patroli dilaksanakan untuk mengamati dengan seksama kondisi kawasan hutan, mengidentifikasi permasalahan maupun kendala di lapangan.
- ✓ Kesimpulan dan Rekomendasi
 - (1). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan-temuan di lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;
 - (2). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

c. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan kegiatan pemadaman kebakaran disekitar dan dalam kawasan hutan dengan maksud agar pemadaman kebakaran hutan dan lahan terlaksana secara efektif serta memperoleh hasil optimal. Pemadaman dilaksanakan dengan dua metode, yaitu Pemadaman Langsung dan Pemadaman tidak langsung. Adapun langkah yang diambil pada pelaksanaan kebakaran Hutan dan lahan adalah:

1. Pengumpulan data primer dan sekunder terkait kebakaran hutan dan lahan,
2. Pelaporan dan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Menganalisa informasi kebakaran hutan dan lahan, termasuk mempertimbangkan:
 - a. Topografi areal yang terbakar

- b. Jenis tanaman/tegakan yang ada
 - c. Luas areal yang terbakar
 - d. Jenis kebakaran yang terjadi (di dalam atau di luar kawasan hutan)
4. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan kehutanan lainnya;
 5. Menetapkan metode yang dipilih
 6. Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan
 7. Pemadaman Api dengan teknis pemadaman yang telah ditentukan.
 8. Periksalah keliling seluruh areal bekas kebakaran, sehingga benar-benar aman.
 9. Lakukan pengukuran luas areal kebakaran, plotkan lokasi tersebut dalam peta, selanjutnya dapat dilakukan analisa kerugian akibat kebakaran yang terjadi dan bila diperlukan rencanakan tindakan penanganan Pasca-Kebakaran Hutan.

10. Pelaporan

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, dengan out line laporan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Dasar Pelaksanaan
- B. Waktu Pelaksanaan
- C. Personil Pelaksanaan
- D. Sumber Dana
- E. Metoda Pelaksanaan

III. HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN/DOKUMENTASI

Laporan dibuat rangkap 4 (empat), 1 (satu) untuk Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (Dua) untuk Bendahara dan 1 (satu) untuk Tim yang bersangkutan.

3. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan adalah Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali.

4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan jadwal sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

5. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.89.245.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan Nomor : 2.00.04.2.00.04.01173.010.5.2 dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana lampiran 1.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan Tahun 2019. Kerangka Acuan Kerja ini akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya sehingga lebih baik dan bermanfaat.

Padang, 21 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
NIP.19720907 199903 1 002

Lampiran 1 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan
Program Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun Anggaran 2019
Nomor : 522.6/012/KPHL BB-2019
Tanggal : 21 Januari 2019

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN

Kode Rekening				Uraian	Rincian Perhitungan			JUMLAH (Rp)
					Vol	Satuan	Harga Satuan	
1				2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	2			BELANJA LANGSUNG				89,245,000
5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA				89,245,000
5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis				10,275,000
5	2	2	01 0001	Belanja Alat Tulis Kantor				5,809,658
				UPTD KPHL Bukit Barisan				
				- Kertas F4	4	Rim	51,000	204,000
				- Kertas A 4	4	Rim	49,000	196,000
				- Catridge Printer Hitam	2	Buah	255,000	510,000
				- Catridge Printer Warna	2	Buah	325,000	650,000
				- Tinta Plotter HP designjet T795	1	Paket	3,049,658	3,049,658
				- Kertas Peta Ukuran A0	2	Rol	600,000	1,200,000
5	2	2	01 0006	Belanja Bahan Bakar Minyak (Yang digunakan langsung untuk kegiatan)				4,465,342
				- BBM Perjalanan Dinas UPTD KPHL Bukit Barisan.	1	LS	3,090,342	4,465,342
5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor				6,650,000
5	2	2	03 0036	Belanja Jasa Buruh/ Tukang/ Mandor				6,650,000
				- Belanja Jasa tenaga kerja/ buruh dalam rangka pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Wilayah KPHL BUKIT BARISAN. (7 kali/10 orang)	70	OH	95,000	6,650,000
5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan				895,000
5	2	2	06 0001	Belanja Cetak				200,000
				- Cetak Blanko Kerjantara	2	Buku	100,000	200,000
5	2	2	06 0002	Belanja Pengadaan				695,000
				Foto Copy Kegiatan di UPTD KPHL Bukit Barisan.				
				- Foto copy laporan, Juklak dan administrasi kegiatan	2,500	Lembar	250	625,000
				- Penjilidan laporan akhir kegiatan	4	Buku	17,500	70,000
5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman				1,610,000
5	2	2	11 0004	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1,610,000
				- Makan dan Minum Buruh pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah UPTD KPHL B. Barisan				1,610,000
				- Makan buruh pemadaman (7 kali/10 orang)	70	Bungkus	23,000	1,610,000
5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas				69,815,000
5	2	2	15 0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				69,815,000
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di KPHL BUKIT BARISAN				69,815,000
				Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pencegahan dan Pengendalian Karhut di Wilayah UPTD KPHL BB dalam Kota Padang.				9,250,000
				- Uang Harian				9,250,000
				- Golongan III (5 orang/ 2 hari/ 5 kali)	50	OH	185,000	9,250,000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Perjalanan Dinas dalam rangka Patroli Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Wilayah UPTD KPHL BB di Luar Kota Padang.				31,920,000
	- Uang Harian				22,120,000
	- Eselon III/IV, staf Gol IV (1 orang/ 2 hari/ 7 kali)	14	OH	500,000	7,000,000
	- Staf Gol III, II, I (2 orang/ 2 hari/ 7 kali)	28	OH	360,000	10,080,000
	- Staf Gol III, II, I Resort KPHL BB (2 orang/ 2 hari/ 7 kali)	28	OH	180,000	5,040,000
	- Uang Penginapan				9,800,000
	- Eselon III/IV, staf Gol IV (1 orang/ 1 hari/ 7 kali)	7	OH	600,000	4,200,000
	- Staf Gol III, II, I (2 orang/ 1 hari/ 7 kali)	14	OH	400,000	5,600,000
	Perjalanan dinas dalam rangka Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Wilayah UPTD KPHL BB Dalam Kota Padang.				3,885,000
	- Uang Harian				3,885,000
	- Golongan III (7 orang/ 3 hari/ 1 kali)	21	OH	185,000	3,885,000
	Perjalanan dinas dalam rangka Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Wilayah UPTD KPHL BB Luar Kota Padang.				24,760,000
	- Uang Harian				15,960,000
	- Eselon III/IV, staf Gol IV (1 orang/ 3 hari/ 2 kali)	6	OH	500,000	3,000,000
	- Staf Gol III, II, I (4 orang/ 3 hari/ 2 kali)	24	OH	360,000	8,640,000
	- Staf Gol III, II, I Resort KPHL BB (2 orang/ 3 hari/ 2 kali)	12	OH	180,000	2,160,000
	- Instansi Polri/TNI/ Kab/kota (2 orang/ 3 hari/ 2 kali)	12	OH	180,000	2,160,000
	- Uang Penginapan				8,800,000
	- Eselon III/IV, staf Gol IV (1 orang/ 2 hari/ 2 kali)	4	OH	600,000	2,400,000
	- Staf Gol III, II, I (4 orang/ 2 hari/ 2 kali)	16	OH	400,000	6,400,000
				JUMLAH	89,245,000

Padang, 21 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
NIP.19720907 199903 1 002

Lampiran 2 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHL Bukit Barisan
 Program Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun Anggaran 2019

Nomor : 522.6/012/KPHL BB-2019

Tanggal : 21 Januari 2019

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN	Bulan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	Desember
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
I.	Persiapan												
	1) Penyiapan dokumen administrasi		Rp. 0,-										
	a. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan												
	b. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan												
	c. Penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan												
	2) Penggandaan Dokumen administrasi Kegiatan		Rp 300,000										
	3) Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan												
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan		Rp 5,809,685										
	- Pengadaan Blanko Kerjantara		Rp 200,000										
II.	Pelaksanaan												
	1) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan												
	- bahan bakar minyak			Rp 556,000	Rp 370,000	Rp 556,000	Rp 370,000	Rp 556,000	Rp 556,000	Rp 575,342			
	- uang harian dan biaya penginapan			Rp 6,410,000	Rp 4,560,000	Rp 6,410,000	Rp 4,560,000	Rp 6,410,000	Rp 6,410,000	Rp 6,410,000			
	- Pembuatan Laporan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan			Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-		
	2) Pemadaman Kebakaran Hutan dan lahan												
	- bahan bakar minyak	Rp			556,000								370,000
	- uang harian dan biaya penginapan	Rp			16,265,000								12,380,000
	- Makan dan Minum pemadaman kebakaran	Rp			805,000								805,000
	- Upah Buruh pemadaman	Rp			4,465,000								2,185,000
	- Pembuatan Laporan pelaksanaan Pengukuran			Rp. 0,-									-

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		Bulan											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	Desember
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	
III.	Pelaporan													
	1) Penyusunan Laporan realisasi kegiatan	- Pembuatan Laporan												
	2) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	- Pembuatan Laporan												Rp. 0,-
		- Penggandaan Laporan												Rp. 395,000

Padang, 21 Januari 2019
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
 NIP.19720907 199903 1 002